

Tinjauan Mata Kuliah

Salah satu kegunaan Buku Materi Pokok (BMP) IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia adalah sebagai landasan bagi mahasiswa dalam memperluas dan mendalami penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang meliputi prinsip, praktik, dan mekanisme pemerintahan.

Matakuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan matakuliah inti (*core*) Program Studi (PS) Ilmu Pemerintahan sehingga setiap mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan wajib menempuh matakuliah ini. Idealnya matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia ditempuh oleh mahasiswa pada semester ketiga. Sebelum menempuh matakuliah ini, mahasiswa hendaknya telah menempuh matakuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan.

Beban kredit untuk matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia adalah 3 SKS yang kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) modul. Setiap modul terdiri dari pendahuluan, uraian materi, latihan, rangkuman, dan tes formatif. Setiap modul memiliki kompetensi khusus yang harus dicapai oleh mahasiswa, modul-modul tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan belajar.

Setelah mempelajari BMP Sistem Pemerintahan Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip, mekanisme dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Secara khusus, kompetensi yang diharapkan dari kesembilan modul tersebut adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis:

1. Dasar-dasar sistem pemerintahan yang meliputi pemerintahan sebagai sistem negara dan pemerintahan, yang meliputi pengertian negara, pembagian kekuasaan negara, bentuk pemerintahan, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dinamika sistem pemerintahan di Indonesia yang merupakan penjabaran dari perkembangan konstitusi dan ketatalaksanaan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa.
3. Landasan, tujuan, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
4. Lembaga-lembaga negara dan hubungan antarlembaga tinggi negara di Indonesia.
5. Pengorganisasian kementerian negara.
6. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga pemerintah non-kementerian.
7. Konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan kelembagaan pemerintahan daerah di Indonesia.
8. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dinamika sistem pemerintahan di Indonesia pada era pasca Orde Baru berkembang dengan sangat cepat. Untuk itu, mahasiswa diharapkan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi yang dapat diamati dari berbagai media massa, misalnya surat kabar, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, mahasiswa dapat menganalisis setiap fenomena pemerintahan yang terjadi di Indonesia dengan berdasar pada teori yang ada.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan materi yang terkandung dalam matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia, Anda dapat membentuk kelompok belajar atau menggabungkan diri dalam sebuah Kelompok Belajar Mandiri. Untuk itu mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) terdekat, yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Selain itu, Anda dapat juga memanfaatkan layanan belajar yang diselenggarakan Universitas Terbuka, seperti tutorial *online* atau tutorial tatap muka.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi matakuliah ini, silakan diperhatikan skema Peta Kompetensi berikut.

Peta Kompetensi
Sistem Pemerintahan Indonesia/IPEM4320/3 sks

